

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan umum yang paling sering terjadi pada negara berkembang yakni laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merujuk pada perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk diukur dengan persentase perubahan jumlah penduduk selama periode tertentu. Jika jumlah kelahiran lebih tinggi daripada jumlah kematian, dan ada juga imigrasi netto atau jumlah pendatang lebih tinggi daripada jumlah yang beremigrasi, maka akan terjadi pertumbuhan penduduk positif. Sebaliknya, jika jumlah kematian lebih tinggi daripada jumlah kelahiran, atau ada emigrasi netto atau jumlah yang beremigrasi lebih tinggi daripada jumlah pendatang, maka akan terjadi pertumbuhan penduduk negative (Zuhdi, 2019).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan pada seluruh aspek kehidupan dan pembangunan suatu negara atau wilayah. Hal tersebut akan mempengaruhi proses pertumbuhan, pemerataan ekonomi, pendidikan serta pelayanan publik. Perkembangan teknologi, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kebijakan keluarga, urbanisasi, dan status ekonomi suatu negara adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, melihat dampak yang begitu kompleks karena besaran laju pertumbuhan penduduk, pemerintah harus melakukan suatu hal untuk mengontrol dan mengatasi hal tersebut. Menurut Todaro (1998) jika pertumbuhan penduduk yang meningkat hal inilah yang akan mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan pembangunan yang semakin tertinggal. Apabila angka laju pertumbuhan penduduk kian meningkat, kualitas penduduk masih rendah dan tingginya angka mortalitas dan angka fertilitas.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk Indonesia ditahun 2023 ini menurun menjadi 1,13% sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1,17 % dan di tahun 2021 sebanyak 1,22%. Salah satu penyebab angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia adalah karena aspek demografi (kependudukan). Kependudukan ini melingkupi tingginya laju pertumbuhan penduduk serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (Restiyani & Murjana Yasa, 2019). Dalam Pertumbuhan penduduk di Indonesia menunjukkan penurunan seiring berjalannya waktu, akan tetapi tetap berada pada tingkat yang cukup signifikan. Penting untuk

memantau laju pertumbuhan penduduk agar pemerintah dan organisasi dapat merencanakan dan mengelola sumber daya secara efisien, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB.

Program Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keluarga Sejahtera yang berkualitas. Program Kampung KB adalah salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Program ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas yakni keluarga yang sejahtera, maju, mandiri, sehat, memiliki anak dengan jumlah ideal yang berwawasan kedepan, harmonis, bertanggungjawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Trianziani, 2018). Program kampung KB ini dikhususkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pembangunan berwawasan kependudukan, program ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, Lembaga non-kementerian, dan swasta dalam memfasilitas, membina dan membimbing masyarakat. Selain itu, program ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Fitriyani, 2023).

Program kampung KB ini menurut Agarwal (2011) telah diakui sebagai program yang memberikan dampak dan faktor yang efektif dalam mengintervensi terkait masalah Kesehatan secara global. Kemudian menurut Miller (2014) keluarga berencana merupakan sebuah program dengan kuantitatif paling sederhana akan tetapi juga yang paling efektif dan praktis dalam memberikan dampak peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, dasar hukum dalam pelaksanaan Program Kampung KB telah diatur dalam Undang-Undang yakni pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa Pembangunan nasional meliputi seluruh dimensi dan aspek kehidupan termasuk dengan perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga dalam mewujudkan masyarakat adil dan Makmur yang dilaksanakan berdasarkan pada pedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, terdapat isu utama dalam integrasi penduduk dan Pembangunan. Isu ini berkenaan dengan penduduk yang tidak hanya dijadikan objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Kemudian isu yang selanjutnya penduduk memiliki peran sebagai subjek pembangunan, oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan atau pelatihan guna menyadarkan hak penduduk serta

sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan (Rianto et al., 2019).

Menurut Timisela et al. (2023) kampung keluarga berkualitas atau kampung KB ini merupakan sebuah model percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif melalui pendekatan individu, keluarga dan masyarakat umum. Melihat kondisi tersebut, masyarakat memiliki peran penting dikarenakan kampung KB perwujudan dari pembangunan berwawasan kependudukan. Program kampung KB ini memang dirancang sebagai sebuah upaya dalam memrevitaliasi program KKBPk untuk memudahkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat sebagai implementasi fungsi-fungsi keluarga dalam masyarakat. Maka, kegiatan dalam program kampung KB ini tidak hanya berkenaan dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi tetapi juga sebagai program Pembangunan terpadu dan terintegrasi melalui berbagai program lainnya (Rianto et al., 2019). Manfaat dari kampung KB ada mengentas kemiskinan dan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Kampung KB tak hanya berbicara tentang membatasi laju pertumbuhan penduduk tetapi juga mengenai pemberdayaan potensi masyarakat agar turut berperan nyata dalam pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan kampung KB ini dapat dijadikan inspirasi bagi desa-desa dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat agar dapat tercipta kesejahteraan keluarga masyarakatnya (Restiyani & Murjana Yasa, 2019).

Adapun program-program dari kampung KB yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dan RDK (Rumah Data Kependudukan). Faktor terpenting dalam keberhasilan program kampung KB ini adalah komitmen dari Kepala Desa atau implementasi kepentingan di seluruh kalangan. Komitmen ini harus dilaksanakan sebab setiap program kegiatan dapat berjalan efektif. Tak hanya itu saja, komitmen kepala desalah yang kelak akan menghubungkan komunikasi dengan berbagai sektor yang berkaitan dengan program kampung KB tersebut.

Kampung KB Desa Pijeran dibentuk oleh Camat Siman pada tanggal 3 Desember 2018 dengan alasan awal sebagai pembentukan Kampung KB adalah desa yang pencapaian peserta KB rendah, akhirnya Desa Pijeran terpilih menjadi kampung KB. Desa Pijeran merupakan desa dengan Tingkat penduduk yang cukup tinggi dengan kualitas kesejahteraan keluarga yang cukup rendah. Tak hanya itu saja, di Desa Pijeran ini juga banyak sekali perumahan serta tak sedikit lahan pertanian dialih fungsikan sebagai perumahan. Padahal pekerjaan mayoritas

penduduk di Desa Pijeran adalah pertanian, sehingga alih fungsi lahan pertanian ini tentu saja akan mempengaruhi Tingkat produktivitas pangan yang menurun dan masyarakat akan lebih banyak membeli bahan pangan daripada menghasilkan sendiri di sawah.

Sebelum adanya Kampung KB kemampuan dan keterampilan masyarakat desa Pijeran masih begitu rendah. Tak hanya itu saja, partisipasi masyarakat begitu rendah. Manfaat dari adanya kampung KB selain sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, juga mengenalkan dan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Kampung KB tidak hanya sebagai upaya dalam mengentaskan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memberdayakan potensi masyarakat yang ada agar turut berpartisipasi dalam pembangunan. Kampung KB juga memberikan manfaat dalam pembangunan masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor.

Sebelum adanya kampung KB di Desa Pijeran pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pijeran masih sangat rendah. Setelah adanya kampung KB dan kegiatan pelatihan didalamnya dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya angka stunting di Desa Pijeran. Dengan adanya kelompok kegiatan BKB Desa Pijeran dibentuk dengan nama “BKB KENANGA” yang merupakan kegiatan pelatihan bagi keluarga yang memiliki balita. BKB Kenanga bersinergi dengan kegiatan Posyandu, kegiatan PAUD, dan penyuluhan atau penyampaian materi. Dalam kegiatan Posyandu dilakukan oleh kader posyandu dibantu dengan petugas Kesehatan atau bidan desa dengan rangkaian kegiatan berupa penimbangan, pencatatan dan pelaporan, penyuluhan, serta pelayanan imunisasi dan pelayanan KB. Kegiatan BKB Kenangan dengan PAUD terlaksana di Balai Desa Pijeran dengan tujuan untuk membentuk karakter anak usia dini sehingga memiliki kesiapan memasuki Pendidikan Dasar dan membantu kesiapan dalam pola pikir anak.

Sedangkan kelompok kegiatan BKL ini berkolaborasi dengan posyandu di Desa Pijeran. Kelompok kegiatan BKB Desa Pijeran ini dibentuk dengan nama “BKL WERDA CERIA”. Sama halnya dengan BKB, BKL ini merupakan sebuah wadah yang diadakan oleh BKKBN sebagai wujud upaya kepedulian dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Sehingga, guna mewujudkan tujuannya dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, BKL Werda Ceria memberikan penyuluhan atau pelatihan, agar meskipun diusia 60 tahun sampai dengan 70 tahun tetap dapat produktif.

Kelompok kegiatan BKR Desa Pijeran dibentuk dengan nama “RAHAYU LESTARI” sebagai upaya dalam membina, memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada anggota keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun. BKR Rahayu Lestari sebagai wadah komunikasi, interaksi, bertukar pemikiran dan pengalaman antara keluarga yang sedang ataupun akan menghadapi masalah remaja sehingga dapat memberikan padangan agar dapat memecahkan masalah yang ada.

PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) Desa Pijeran dibentuk dengan nama “TUNAS BANGSA” sebagai wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memeberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan remaja mendatang.

UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) di Desa Pijeran dibentuk dengan nama “LANCAR JAYA”, dan UPPKA ini merupakan sebuah kelompok usaha ekonomi produktif. Tujuan dari UPPKA Lancar Jaya adalah mengsosialisasikan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan serta kemandirian keluarga, dan mengajak keluarga bergerak aktif dalam ekonomi produktif. UPPKA Lancar Jaya ini mewadahi kegiatan ekonomi produktif di Desa Pijeran yang meliputi kegiatan pembuatan Tas anyaman, roti basah, budidaya ikan lele dan pembuatan kripik tempe.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan program kampung KB lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya masyarakat yang menggunakan KB serta partisipasi dalam beberapa programnya. Sehingga hal ini memberikan dampak yang positif dalam Pembangunan Masyarakat desa. Meski demikian, juga terdapat beberapa program yang masih belum terealisasi. Melalui penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Pijeran”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan program kampung KB di Desa Pijeran?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kampung KB di Desa Pijeran.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana dalam ilmu tentang pelaksanaan program kampung KB di Desa Pijeran

2. Secara Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan permasalahan secara objektif melalui karya ilmiah sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna.

2. Manfaat bagi pemerintah Desa Pijeran

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Desa Pijeran dalam pelaksanaan program kampung KB.

3. Bagi masyarakat umum

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Pelaksanaan

Menurut Wiestra, dkk (2014) pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan guna menjalankan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan dengan melengkapi semua Sumber daya yang dibutuhkan, siapa yang menjalankan, lokasi pelaksanaan serta kapan waktu pelaksanaan akan dimulai. Dengan demikian, pelaksanaan adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh suatu lembaga dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan secara teratur, terarah dan berencana.

2. Kampung KB

Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB diartikan sebagai satuan wilayah dalam tingkat desa yang memiliki integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan instansi keluarga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Kampung KB ini konsep pembangunan dengan berwawasan kependudukan. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan intasnsi keluarga, sangat perlu adanya dorongan dalam penyelenggaraan kampung KB di setiap desa/kelurahan.

F. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi isu-isu atau masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat atau negara. Kebijakan publik biasanya dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Menurut Eyestone (1971) dalam bukunya yang berjudul *The Threads of Public Policy* (1971) memberikan definisi kebijakan publik sebagai suatu hubungan atau relasi antara pemerintah dengan unit dilingkungannya. Akan tetapi banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut masih dalam arti luas untuk dipahami.

Definisi lain yang menjelaskan tentang kebijakan publik ditawarkan juga oleh Carl Friedrich (1969) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu wilayah tertentu terdapat permasalahan yang dimana kebijakan yang diusulkan tersebut diharapkan dapat memberi solusi atau manfaat penyelesaiannya (Agustino, 2008). Sedangkan menurut James Anderson (1984) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang disebutkan.

Adapun untuk Implementasi Kebijakan sendiri menurut KBBI implementasi diartikan sebagai penerapan dan pelaksanaan. Menurut Hill and Hope dalam Handoyo (2010) mengartikan definisi implementasi kebijakan sebagai hal yang terjadi antara kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi merupakan fakta yang dilakukan berdasarkan suatu Keputusan yang telah dibuat dan disepakati. Melalui implementasi inilah suatu kebijakan dapat disebut berhasil dengan memberikan dampak bagi fenomena yang terjadi. Sehingga pada prinsipnya implementasi kebijakan ini merupakan cara agar suatu kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh Pramono (2020) implementasi itu memahami apa yang terjadi sebenarnya fakta-fakta yang ada dilapangan selama proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan ini nantinya akan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang didalamnya mencakup administrasi, dampak dari implementasi suatu kebijakan dimasyarakat. Sedangkan menurut

Nugroho, (2021), implementasi publik adalah sebuah cara agar kebijakan publik dapat mencapai tujuannya. Dan dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat 2 pilihan langkah yang ada, yaitu dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Pramono (2020) keberhasilan implementasi itu dipengaruhi oleh 2 indikator, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Indikator tersebut sudah mencakup dari sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, manfaat yang akan diterima oleh sasaran, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, tata letak program sudah tepat, implementor yang disebutkan jelas, program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Kemudian untuk isi dari kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- b. Perubahan yang diinginkan
- c. Kedudukan pembuat kebijakan
- d. Siapa pelaksana program dan sasarannya
- e. Sumberdaya yang dihasilkan.

Kemudian, untuk konteks dari lingkungan implementasinya yakni :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik Lembaga penguasa
- c. Kepatuhan dan tanggap daya.

2. Pelaksanaan Program Kampung KB

Tujuan dari adanya kampung KB adalah meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor yang berkaitan dengan mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Dengan ini terdapat beberapa Program dalam pelaksanaan Program Kampung KB :

1. BKB (Bina Keluarga Balita) merupakan suatu program pembinaan keluarga guna mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. BKB ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran serta sikap orang tua guna mempersiapkan Pendidikan anak usia 0-5 tahun dalam menumbuh kembangkan kecerdasan balita (DPPKB, 2021).

2. BKR (Bina Keluarga Remaja) merupakan bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan pemahaman dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang remaja. Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga dan remaja. (Sari, 2017) .
3. BKL (Bina Keluarga Lansia) merupakan kelompok kegiatan keluarga yang bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia serta untuk meningkatkan kualitas taraf hidup lansia. Target dari kegiatan ini adalah keluarga yang memiliki lansia dan juga lansia itu sendiri. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. (Sumbergondo, 2018).
4. PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) merupakan sebuah wadah dalam program kampung KB yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja agar memberikan pelayanan informasi dan konseling seputar rencana kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya (Podang Kuning, 2020).
5. UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) merupakan kelompok kegiatan pembangunan keluarga Sejahtera dan ketahanan keluarga dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial sebagai bentuk pemberdayaan keluarga diskala mikro. Sasaran dari UPPKA adalah pemilik usaha dan juga masyarakat yang berKB serta kaader-kader kelompok kegiatan. (Onekore, 2023).
6. RDKIK (Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga) merupakan kelompok kegiatan Masyarakat yang melakukan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan Pembangunan didesa/kelurahan. RDKIK ini pusat basis data dan informasi Pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana serta pusat intervensi Pembangunan tingkat mikro (Dispermades, 2020).

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional dalam penelitian ini yakni menjelaskan bagaimana pelaksanaan program kampung KB di Desa Pijeran. program kampung keluarga berkualitas (KB) di Desa Pijeran. Pelaksanaan kebijakan merupakan proses implementasi dari suatu kebijakan yang telah direncanakan agar mencapai tujuan tertentu.

Variabel Tentang Implementasi Kebijakan :

- Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- Derajat perubahan yang diinginkan
- Kedudukan pembuat kebijakan

- Pelaksana program
- Sumberdaya yang dihasilkan.

Variabel Tentang pelaksanaan program kampung KB :

- BKB (Bina Keluarga Balita)
- BKR (Bina Keluarga Remaja)
- BKL (Bina Keluarga Lansia)
- PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)
- UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)
- RDKIK (Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga)

H. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2013) adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggali serta memahami suatu fenomena yang terjadi secara mendalam. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengeksplorasi data secara mendalam dan menelusuri fakta-fakta yang ada dilapangan. Untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi peneliti harus menganalisis dengan mewawancarai partisipan penelitian dan mengajukan pertanyaan yang umum dan cukup luas. Hasil analisis dari wawancara tersebut dapat berupa penggambaran atau penjelasan, serta tema.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Pijeran Kecamatan Siman Ponorogo. Saya memilih lokasi untuk penelitian ini karena ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan program kampung KB. Lokasi penelitian ini dipilih karena target pencapaian peserta KB yang rendah.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive Sampling* sebagai teknik penentuan informan. Teknik pengumpulan *purposive sampling* ini diartikan dengan pengambilan informan yang dilakukan secara sengaja atau telah dipikirkan terlebih dahulu untuk mendapatkan informan yang berkualitas. Dapat disimpulkan teknik *purposive sampling* ini, peneliti sudah menentukan apa yang

perlu diketahui dan sudah menentukan seorang informan yang tepat dan bersedia untuk memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada dilapangan (Etikan, 2016).

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Desa Pijeran, Penyuluh KB, Ketua Program Kampung KB dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kampung KB ditetapkan sebagai subjek dan informan dalam penelitian pelaksanaan program kampung KB Desa Pijeran.

Adapun Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siman
2. Perangkat Desa Pijeran
3. Kader BKB
4. Kader BKL
5. Kader UPPKA
6. Peserta Kelompok Kegiatan

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Raharjo (2011) Pengumpulan data merupakan bagian dari tahapan penting dalam penelitian. Apabila teknik pengumpulan data benar maka akan menghasilkan data yang kredibilitas tinggi, begitupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti di lokasi dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung mengenai perilaku atau aktivitas kehidupan objek penelitian di lokasi penelitian dengan peneliti menempatkan diri dalam aktivitas kehidupan informan atau objek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung ke objek penelitian dengan memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang ditemukan di lapangan, guna mengkaji lebih dalam data-data yang diperlukan sebagai acuan topik penelitian. Dalam observasi penelitian bersifat terbuka, peneliti dapat mengajukan pertanyaan umum kepada informan untuk memungkinkan memberikan pandangan mereka secara bebas (Creswell, 2013).

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek

penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Wawancara menurut Babbies (2011) kualitatif merupakan interaksi antara pewawancara dengan informan yang telah direncanakan dalam penelitian umum dan mencakup topik pembahasan. Pada saat wawancara, pewawancara harus sepenuhnya memahami pertanyaan yang akan diajukan. Hal ini bertujuan agar proses wawancara dapat berjalan lancar dan alami.

Secara sederhana, pengertian dari wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dan informasi dalam penelitian melalui komunikasi secara tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan informan melalui pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya sesuai topik pembahasan. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dengan cara semi terstruktur. Pewawancara mengacu pada pertanyaan wawancara yang sudah ditetapkan, akan tetapi pertanyaan-pertanyaannya dapat keluar dari instrumen pertanyaan yang telah dibuat. Wawancara seperti ini mempunyai kelebihan agar informasi yang diperoleh lebih mendalam dan data yang didapat juga lebih lengkap mengenai pelaksanaan kebijakan kampung KB Desa Pijeran.

3. Dokumentasi

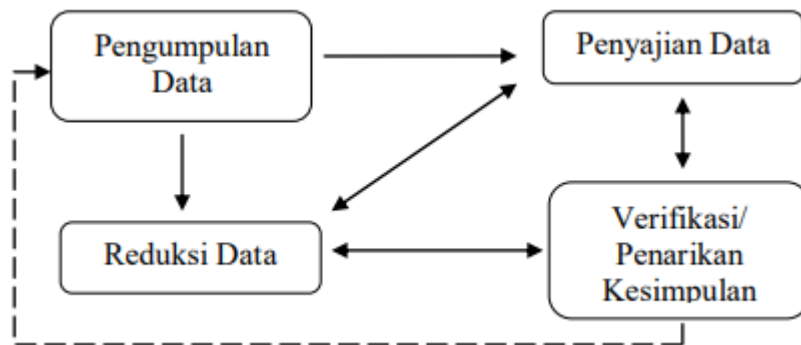
Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan setelah data dari informan terkumpul. Menurut Miles and Huberman (1994) dalam analisis data ini melalui beberapa tahapan diantaranya, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Adapun analisis data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Program Kampung KB Desa Pijeran, diantaranya:

Gambar 1. 1

Teknik Analisa Data dalam Penelitian Kualitatif



Sumber : (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1994)

a) Pengumpulan Data.

Dalam tahap ini, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari informan. Data diperoleh dalam bentuk tulisan maupun angka yang akan dijabarkan dalam kata-kata dan dicatat secara objektif dan apa adanya sesuai dengan kenyataan dilapangan.

b) Reduksi Data.

Pada tahap ini akan dilakukan pemilahan, perhatian pada penyederhanaan, penggolongan mencari data yang penting dan data yang diperlukan dari informasi data kasar yang muncul dalam catatan tertulis dilapangan.

c) Penyajian Data.

Tahap ini adalah hasil dari tahap sebelumnya yang diproses dan tersusun secara terpadu serta sudah dipahami yang dapat ditarik kesimpulannya maupun kemungkinan adanya pengambilan tindakan.

d) Menarik Kesimpulan.

Tahap yang terakhir yakni pengambilan kesimpulan mengenai pelaksanaan program kampung KB Desa Pijeran.